



**LAPORAN MANAJEMEN RISIKO (MR)  
TRIWULAN IV TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA DENPASAR**



**DENPASAR  
2023**





## B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yaitu untuk menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari dilaksanakannya pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yaitu memastikan agar seluruh program, kegiatan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi Kota Denpasar yaitu “***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju***” dan misi Kota Denpasar khususnya misi ke 4 yaitu “*Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana*” dapat terlaksana dengan baik.

## D. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

## BAB II

### RENCANA DAN REALISASI

#### KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

##### A. Rencana kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah Triwulan IV

Berikut adalah daftar rencana kegiatan tindak pengendalian dari risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar	RSO.22.16.19.01	Pendataan jaringan Perangkat Daerah yang belum terkoneksi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membangun sistem jaringan fiber optik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
2	Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah	RSO.22.16.19.02	Pendataan database system yang ada pada Perangkat Daerah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan integrasi database secara bertahap	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
3	Belum optimalnya Pengembangan	RSO.22.16.19.03	Pendataan aplikasi mobile yang dibangun	Kebijakan dan Prosedur pengendalian	Melaksanakan integrasi aplikasi mobile secara bertahap	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK

	Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile		Perangkat Daerah	sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi		
4	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika	RSO.22.16.19.04	Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TIK	Kepala Dinas/Sekretaris Dinas
5	Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar	RSO.22.21.19.05	Dokumen Standar Keamanan Informasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keamanan Informasi secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian
6	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan daerah	RSO.22.20.19.06	Koordinasi terkait data-data yang dibutuhkan dengan pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke instansi terkait	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP
7	Belum optimalnya system Informasi data dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah	RSO.22.16.19.07	Sosialisasi system informasi data pada pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan frekuensi sosialisasi ke instansi terkait	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP

II	Risiko Operasional OPD					
1	Kerusakan perangkat elektronik penyiaran	ROO.22.16.19.01	SOP pemeliharaan sarana prasarana	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan perangkat secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP
2	Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai	ROO.22.16.19.02	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi penyampaian informasi ke masyarakat	Kepala Dinas/Kepala Bidang PKP
3	Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang	ROO.22.16.19.03	Melakukan analisa terkait trend/isu yang berkembang pada media massa	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memanfaatkan aplikasi <i>Media Analytics</i> untuk membantu menganalisa trend/isu yang berkembang	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP
4	Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana	ROO.22.16.19.04	Menyiapkan alternatif media advetorial internet	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi penyedia media advetorial internet	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP
5	Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia	ROO.22.16.19.05	Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi TIK secara mandiri	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
6	Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE	ROO.22.16.19.06	Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi kondisi TIK saat ini	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
7	Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat	ROO.22.16.19.07	Identifikasi dan standarisasi interoperabilitas data	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu	Mengintegrasikan aplikasi yang parsial secara bertahap	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK

				menangani risiko yang teridentifikasi		
8	Kapasitas aparatur bidang TIK tidak tercapai	ROO.22.16.19.08	Mengikuti pelatihan-pelatihan terkait TIK	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi kompetensi aparatur Bidang TIK	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
9	Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses	ROO.22.16.19.09	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Proses pengadaan barang/jasa terkait pengadaan Cloud Server dipercepat	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
10	Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor	ROO.22.16.19.10	SOP pemeliharaan sarana prasarana	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
11	Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat	ROO.22.16.19.11	Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK
12	Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat waktu	ROO.22.21.19.12	Time Schedule pelaksanaan kegiatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian
13	Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.22.21.19.13	Matrik Perencanaan Kegiatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian
14	Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain	ROO.22.21.19.14	Dokumen Pernyataan Perjanjian Keraasiaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu	Evaluasi pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian

				menangani risiko yang teridentifikasi		
15	Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai	ROO.22.21.19.15	Daftar target dokumen audit keamanan Informasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring keamanan informasi secara berkala	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian
16	Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik	ROO.22.21.19.16	Standar materi pelatihan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi materi pelatihan keamanan informasi	Kepala Dinas/Kepala Bidang Persandian
17	Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid	ROO.22.20.19.17	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP
18	Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid	ROO.22.20.19.18	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar	Kepala Dinas/Kepala Bidang PIP
19	Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error	ROO.22.16.19.19	<i>Backup</i> data secara berkala	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyiapkan <i>backup</i> Server	Kepala Dinas/Kepala Bidang TIK

## B. Realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah Triwulan IV

Berikut adalah daftar realisasi tindak pengendalian dari risiko yang sudah diidentifikasi sebelumnya :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Realisasi Tindak Pengendalian
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Masih adanya beberapa Perangkat Daerah yang belum mendapatkan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Kota Denpasar	RSO.22.16.19.01	Pendataan jaringan Perangkat Daerah yang belum terkoneksi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Membangun sistem jaringan fiber optik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara bertahap	Monitoring lapangan telah dilaksanakan, dengan persentase realisasi 100%
2	Belum optimalnya Integrasi Data Center dari masing-masing Perangkat Daerah	RSO.22.16.19.02	Pendataan database system yang ada pada Perangkat Daerah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan integrasi database secara bertahap	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 95%
3	Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Mobile	RSO.22.16.19.03	Pendataan aplikasi mobile yang dibangun Perangkat Daerah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan integrasi aplikasi mobile secara bertahap	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 80%
4	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang teknologi Komunikasi dan Informatika	RSO.22.16.19.04	Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana TIK	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 100%
5	Belum optimalnya pelaksanaan Keamanan Informasi di Kota Denpasar	RSO.22.21.19.05	Dokumen Standar Keamanan Informasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Keamanan Informasi secara berkala	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 90%
6	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan data dalam	RSO.22.20.19.06	Koordinasi terkait data-data yang dibutuhkan dengan pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke instansi terkait	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 100%

	perencanaan pembangunan daerah			mampu menangani risiko yang teridentifikasi		
7	Belum optimalnya system Informasi data di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan Daerah	RSO.22.16.19.07	Sosialisasi system informasi data pada pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan frekuensi sosialisasi ke instansi terkait	Sudah dilaksanakan dan proses masih berjalan dengan persentase realisasi 100%
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
1	Kerusakan perangkat elektronik penyiaran	ROO.22.16.19.01	SOP pemeliharaan sarana prasarana	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan perangkat secara berkala	Sudah dilaksanakan dan proses pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan
2	Penyebaran informasi media luar ruangan dan media cetak tidak tercapai	ROO.22.16.19.02	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi penyampaian informasi ke masyarakat	Sudah berjalan dengan mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial
3	Informasi yang disampaikan ke masyarakat tidak sesuai dengan trend/isu/situasi yang berkembang	ROO.22.16.19.03	Melakukan analisa terkait trend/isu yang berkembang pada media massa	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memanfaatkan aplikasi <i>Media Analytics</i> untuk membantu menganalisa trend/isu yang berkembang	Mengoptimalkan penyebaran isu yang berkembang
4	Penyampaian informasi pada media advetorial internet tidak dapat terlaksana	ROO.22.16.19.04	Menyiapkan alternatif media advetorial internet	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi penyedia media advetorial internet	Monitoring penyediaan media
5	Evaluasi TIK melalui dokumen audit TIK tidak tersedia	ROO.22.16.19.05	Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi TIK secara mandiri	Monitoring dilakukan secara mandiri

6	Pengembangan TIK tidak sesuai perencanaan SPBE	ROO.22.16.19.06	Pepres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi kondisi TIK saat ini	Monitoring dilakukan secara mandiri
7	Aplikasi bersifat parsial, pengelolaan satu data akan terhambat	ROO.22.16.19.07	Identifikasi dan standarisasi interoperabilitas data	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintegrasikan aplikasi yang parsial secara bertahap	Mengintegrasikan aplikasi secara bertahap
8	Kapasitas aparatur bidang TIK tidak tercapai	ROO.22.16.19.08	Mengikuti pelatihan-pelatihan terkait TIK	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi kompetensi aparatur Bidang TIK	Evaluasi kompetensi aparatur Bidang
9	Aplikasi pemerintahan berbasis Cloud Computing tidak dapat diakses	ROO.22.16.19.09	Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Proses pengadaan barang/jasa terkait pengadaan Cloud Server dipercepat	Proses terkait pengadaan Cloud Server dipercepat
10	Beberapa Komponen mengalami kerusakan, dan ruang kontrol videotron bocor	ROO.22.16.19.10	SOP pemeliharaan sarana prasarana	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala	pemeliharaan sarana prasarana videotron secara berkala
11	Pelayanan publik berbasis elektronik terhambat	ROO.22.16.19.11	Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana TIK yang ada	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala	pemeliharaan sarana prasarana dan system secara berkala
12	Penyelesaian Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak tepat	ROO.22.21.19.12	Time Schedule pelaksanaan kegiatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah	Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE	pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile

	waktu			dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi		Layanan TTE
13	Aplikasi Mobile Layanan TTE tidak sesuai dengan perencanaan	ROO.22.21.19.13	Matrik Perencanaan Kegiatan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala	perencanaan kegiatan pengembangan Aplikasi Mobile Layanan TTE secara berkala
14	Resiko keamanan Sistem Informasi diketahui pihak lain	ROO.22.21.19.14	Dokumen Pernyataan Perjanjian Keraasiaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi	pelaksanaan standar penilaian Keamanan Informasi
15	Laporan audit keamanan informasi tidak sesuai	ROO.22.21.19.15	Daftar target dokumen audit keamanan Informasi	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring keamanan informasi secara berkala	Monitoring keamanan informasi secara berkala
16	Materi pelatihan tidak tersampaikan dengan baik	ROO.22.21.19.16	Standar materi pelatihan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi materi pelatihan keamanan informasi	Monitoring materi pelatihan keamanan informasi
17	Data dan Informasi pada Buku Denpasar Membangun tidak lengkap atau tidak valid	ROO.22.20.19.17	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun	rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Denpasar Membangun
18	Data dan Informasi pada Buku Profil Kota Denpasar tidak lengkap atau tidak valid	ROO.22.20.19.18	Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar	rekonsiliasi data dengan <i>Stakeholder</i> penyedia data Buku Profil Kota Denpasar

19	Server aplikasi Sistem Bank Data menjadi error	ROO.22.16.19.19	<i>Backup</i> data secara berkala	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyiapkan <i>backup</i> Server	Menyiapkan <i>backup</i> Server
----	--	-----------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Proses pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan terhambat, disebabkan oleh perubahan-perubahan peraturan pengadaan barang/jasa.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan kurang efisiensinya proses pelaksanaan kegiatan.
3. Belum lengkapnya data-data yang terkumpul untuk mewujudkan portal satu data, sebagai sumber data untuk perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.

### **BAB IV**

#### **MONITORING RISIKO DAN RTP**

Berdasarkan hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko dan pelaksanaan tindak pengendalian risiko pada Triwulan IV, direkomendasikan beberapa hal sbb :

1. Mensosialisasikan peraturan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan pemahaman, kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa mengintegrasikan sistem-sistem yang menggunakan sumber data yang sama.
3. Berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk segera melengkapi data-data yg dibutuhkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari seluruh risiko yang sudah diidentifikasi, persentase capaian tindak pengendalian atas risiko dimaksud pada triwulan IV yaitu sebesar 95 % , dari hasil yang dicapai ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ke depannya akan melakukan monitoring pengelolaan risiko secara lebih intens dan segera berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam hal perbaikan pengelolaan risiko, sehingga segala kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah pada periode berikutnya dapat diminimalisir.

Denpasar, 29 Desember 2023

